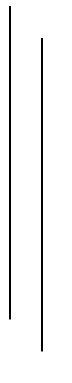




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2019**

**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



SEKRETRIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM  
Jl. Pahlawan No.9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 84500190  
Semarang 50243

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. LKjIP Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikemas secara teknis.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini dan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Semoga dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2020

**KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

**DADANG SOMANTRI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 196506221987031007

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	.....	1
<b>Daftar Isi</b>	.....	2
<b>Daftar Gambar</b>	.....	3
<b>Daftar Tabel</b>	.....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	5
A. Gambaran Umum Organisasi	.....	5
B. Fungsi Strategis Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa	.....	9
C. Permasalahan Yang Dihadapi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam	.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	.....	19
B. Meningkatkan Efektivitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	.....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	37
A. Kesimpulan	.....	37
B. Saran	.....	37

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1</b>	Struktur organisasi Biro Infrastruktur Dan SDA .....	7
<b>Gambar 3.1</b>	RAKOR Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	22
<b>Gambar 3.2</b>	RAKOR Keterpaduan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	22
<b>Gambar 3.3</b>	FGD ICZM di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah .....	23
<b>Gambar 3.4</b>	RAKOR Sinergitas Kebijakan Pemenuhan Akses Rumah Layak Huni untuk mendorong Pengurangan Angka Kemiskinan di Jawa Tengah .....	24
<b>Gambar 3.5</b>	RAKOR Kebijakan dan Strategi untuk Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Jawa Tengah .....	24
<b>Gambar 3.6</b>	RAKOR Sinergitas Pembangunan Infrastruktur : Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman di Jawa Tengah .....	25
<b>Gambar 3.7</b>	Nota Kesepahaman Pengelolaan Danau Rawa Pening dan DAS Tuntang .....	26
<b>Gambar 3.8</b>	Kongres Sampah Tahun 2019 .....	26
<b>Gambar 3.9</b>	Rapat Koordinasi Energi Baru terbarukan (EBT) mendukung RUED (Energi Mix) .....	27
<b>Gambar 3.10</b>	Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Migas di Jawa Tengah .....	27
<b>Gambar 3.11</b>	Rakor Persiapan Penerapan Sistem informasi Nelayan Terintegrasi di Jawa Tengah .....	28
<b>Gambar 3.12</b>	RAKOR Membangun Pasar Domestik Garam rakyat Jawa Tengah .....	29

## Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b>	Sasaran dan Indikator Kinerja .....	12
<b>Tabel 2.2</b>	Pelaksanaan Program,Kegiatan Dan Target Kinerja .....	14
<b>Tabel 3.1</b>	Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja .....	19
<b>Tabel 3.2</b>	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Biro Infrastruktur dan SDA .....	20
<b>Tabel 3.3</b>	Capaian Indikator Sasaran .....	21
<b>Tabel 3.4</b>	Capaian Indikator Sasaran .....	30
<b>Tabel 3.6</b>	Capaian Indikator Sasaran .....	35
<b>Tabel 3.7</b>	IKU .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
2. pengkoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
4. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian. Susunan Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dengan jabatan struktural adalah sebagai berikut :

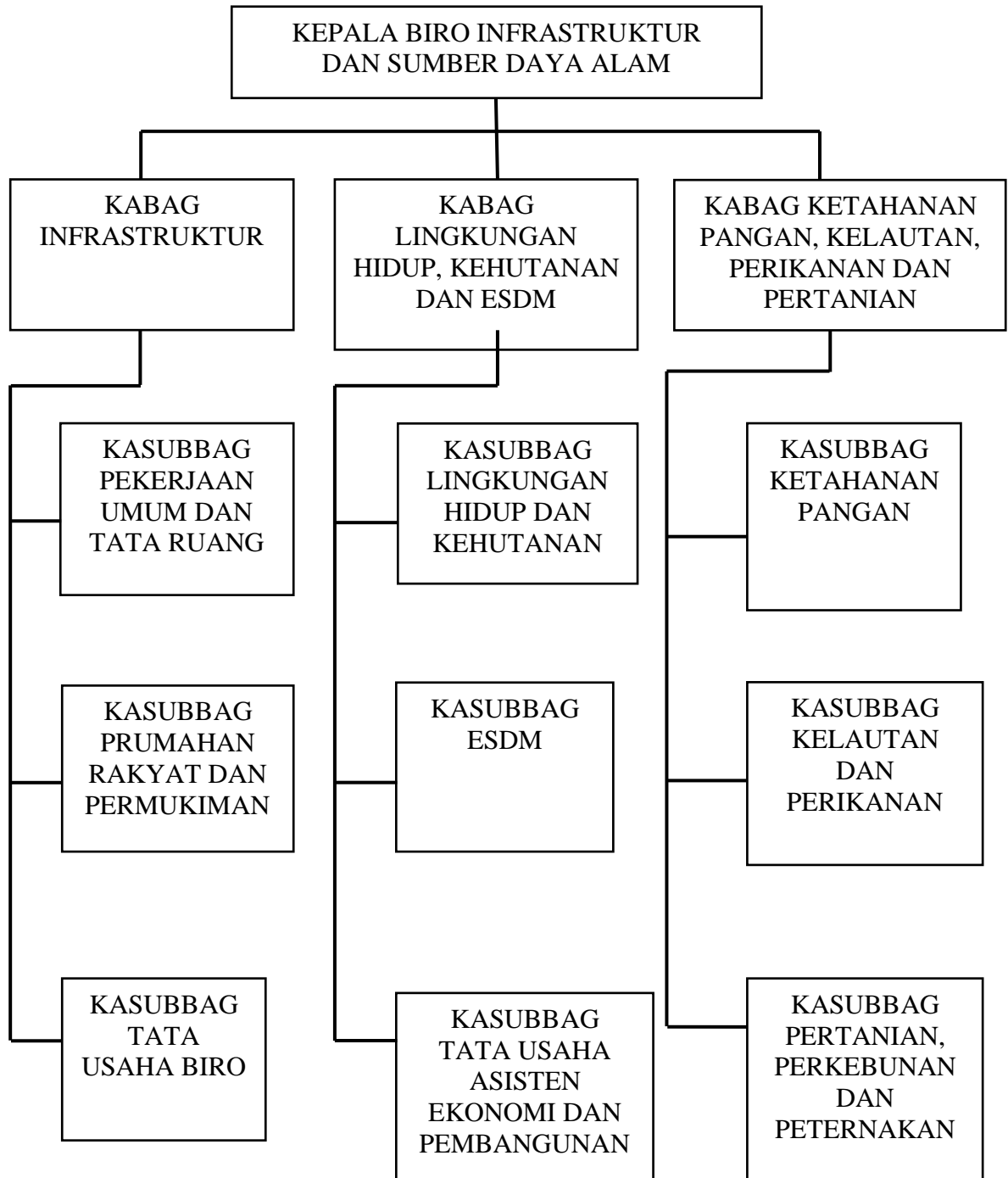
- 1) Kepala Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam:
- 2) Kepala Bagian Infrastruktur, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - b) Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3) Kepala Bagian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- 4) Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Pertanian, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Ketahanan Pangan;
  - b) Sub Bagian Kelautan dan Perikanan;
  - c) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI

### BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

(Pergub Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 )



**Gambar 1.1** Struktur organisasi Biro Infrastruktur Dan SDA



Jumlah personil di lingkungan Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2019, adalah sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang atau PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Klasifikasi Kepegawaian Menurut Eselon, sebagai berikut :

a.	Eselon II.B	:	1 orang
b.	Eselon III.A	:	3 orang
c.	Eselon IV.A	:	9 orang
d.	Staf	:	23 orang
	<b>Jumlah total</b>	:	<b>35 orang</b>

2. Klasifikasi Kepegawaian Menurut Pangkat / Golongan Ruang :

a.	Golongan IV-d	:	1 orang
b.	Golongan IV-b	:	3 orang
c.	Golongan IV-a	:	4 orang
d.	Golongan III-d	:	11 orang
e.	Golongan III-c	:	5 orang
f.	Golongan III-b	:	7 orang
g.	Golongan III-a	:	1 orang
h.	Golongan II-d	:	1 orang
i.	Golongan II-c	:	1 orang
J.	Golongan II-b	:	1 orang
	<b>Jumlah</b>	:	<b>35 orang</b>

3. Klasifikasi Pendidikan Formal :

a.	Pasca Sarjana	:	14 orang
b.	Sarjana	:	15 orang
c.	Sarjana Muda	:	1 orang
d.	SLTA	:	4 orang
e.	SD	:	1 orang
	<b>Jumlah total</b>	:	<b>35 orang</b>

## **B. Fungsi Strategis Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dimaksud, maka secara umum Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki Fungsi strategis yaitu :

**“Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Melalui Fasilitasi dan Koordinasi Menuju Masyarakat Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari“**

Secara singkat Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian.

## **C. Permasalahan Yang Dihadapi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam**

Permasalahan utama Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan di bidang kesekretariatan secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan (RTRW) dan perizinan yang akan dipergunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu tertib administrasi;
2. Jumlah Backlog Perumahan di Jawa Tengah sebesar 10.674 unit pada tahun 2019 yang relative besar;
3. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah;
4. Perlunya percepatan pelaksanaan proyek prioritas, terutama infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah;
5. Keterbatasan pembiayaan yang dimiliki pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur menuntut adanya pendanaan bersumber dari non-anggaran pemerintah.

6. Adanya kekhawatiran pihak Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan sistem multi years yang melewati masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah.
7. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk meningkatkan perikanan serta masih rendahnya angka konsumsi makan ikan oleh masyarakat Jawa Tengah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ke arah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKJIP Sekretariat Daerah 2019 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang infrastruktur dan Sumber daya alam. Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan melaksanakan Tujuan–5 Setda yaitu “Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian” dengan sasarannya :

**Tabel 2.1**  
Sasaran dan Indikator Kinerja

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>2019</b>
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80

## **Perjanjian Kinerja.**

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja **sebagaimana terlampir.**

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 4 program yang diimplementasikan dalam 24 kegiatan serta didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. **6.900.000.000,-**, lewat Perubahan Anggaran Tahun 2019. Pada awal tahun 2019 Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebesar Rp. **6.900.000.000** ,-, dengan 4 Program yang diimplementasikan dalam 24 Kegiatan.

### **Program kegiatan Pendukung sasaran**

Guna mencapai sasaran organisasi maka biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target indikator kinerja sasaran. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Program ,Kegiatan dan Target Kinerja secara lengkap sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Pelaksanaan Program,Kegiatan Dan Target Kinerja

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
<b>1) Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan pemerintah Daerah</b>	1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Dokumen	400.000.000,-
	2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	400.000.000
	3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Dokumen	200.000.000
	4) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2 Dokumen	200.000.000

	Mineral			
	5) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	1 Dokumen	100.000.000
	6) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	2 Dokumen	100.000.000
	7) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3 Dokumen	200.000.000
<b>2) Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>	1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Laporan	275.000.000
	2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	4 Laporan	275.000.000
	3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	2 Laporan	200.000.000
	4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	2 Laporan	450.000.000
	5)	jumlah laporan	7 Laporan	1.600.000.000



	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
	6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	5 Laporan	350.000.000
	7) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	300.000.000
<b>3) Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah</b>	1) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Laporan	250.000.000
	2) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Laporan	100.000.000
	3) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	100.000.000

	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
	4) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	1 Laporan	100.000.000
	5) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan	120.000.000
	6) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan Perikanan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	80.000.000
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2 Laporan	150.000.000
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	1) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Buah	200.000.000
	2) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Buah	700.000.000

	3) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Buah	50.000.000
--	---	--	---------	------------

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2019. Secara umum realisasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2019.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 1 (satu) tujuan dengan 3 indikator dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang akan dicapai. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 100%. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

#### **Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil capaian

kinerja 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2019 sebagai berikut:

Capaian Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Sampai dengan akhir tahun 2019 sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Adapun Capaian dari tujuan dan sasaran yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) indikator dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Biro Infrastruktur dan SDA**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>% Capaian 2019</b>
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	100	123.45
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	80	125
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	80	100

## SASARAN MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH

Indikator kinerja sasaran dengan capaian setiap indikator Sasaran sebagai berikut:

**Indikator Sasaran** : Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	100	94	106.38

Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi terealisasi 100% dengan ketercapaian sebesar 123,46% terhadap target dan 106,38% terhadap tarhet akhir renstra.

Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan 7 (tujuh) kegiatan yang selama tahun anggaran 2019 telah menghasilkan 24 (Dua Puluh Empat) rekomendasi yang ditindaklanjuti kepada pimpinan dan telah efektif dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun yang akan datang, yaitu:

- 1). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang menghasilkan 3 (tiga) *policy brief* yaitu :

- a).Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Tengah, ditindaklanjuti dengan surat edaran gubernur kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah untuk Melaksanakan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) serta upaya revisi produk rencana tata ruang di daerah Jawa Tengah harus benar-benar mengacu kepada Perundangan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Melakukan sinkronisasi RTRW antara RPJP dan RPJMD, Melakukan evaluasi perijinan pada kegiatan yang terduga melanggar pemanfaatan ruang di daerah, Melaksanakan pembinaan tata ruang kepada masyarakat mulai dari skala

desa di Jawa Tengah, baik dengan sosialisasi manual maupun melalui sistem informasi publik.



**Gambar 3.1 RAKOR Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

- b). Keterpaduan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah, di tindaklanjuti dengan penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Integrated Coastal Zone Management (ICZM) di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah;



**Gambar 3.2 RAKOR Keterpaduan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

- c). Integrated Coastal Zone Management (ICZM) di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah, ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan percepatan penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Cara Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Peraturan Gubernur untuk memberikan penugasan kepada Pemerintah Kab./Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk berperan dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir



**Gambar 3.3 FGD ICZM di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah**

- 2). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghasilkan 3 (tiga) *policy brief* yaitu :
  - a. Sinergitas Kebijakan Pemenuhan Akses Rumah Layak Huni Untuk Mendorong Pengurangan Angka Kemiskinan di Jawa Tengah, ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar fokus pada Desa/Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah, optimalisasi program CSR dan program Kemitraan Bina Lingkungan secara sinergis dan berkelanjutan dan peningkatan dan optimalisasi penanganan RTLH;





**Gambar 3.4 RAKOR Sinergitas Kebijakan Pemenuhan Akses Rumah Layak Huni untuk Mendorong Pengurangan Angka Kemiskinan di Jawa Tengah**

- b. Kebijakan dan Strategi untuk Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Jawa Tengah ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah koordinatif dengan unsur-unsur yang terkait (SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, cipta karya, lingkungan hidup serta perumahan dan kawasan permukiman) dalam upaya pembangunan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan;



**Gambar 3.5 RAKOR Kebijakan dan Strategi untuk Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Jawa Tengah**

- c. Sinergitas Pembangunan Infrastruktur: Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman di Jawa Tengah, ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah OPD di lingkup infrastruktur melaksanakan sinergi pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum,

perumahan dan permukiman di Jawa Tengah sesuai dengan usulan rekomendasi.



**Gambar 3.6 RAKOR Sinergitas Pembangunan Infrastruktur : Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman di Jawa Tengah**

3). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghasilkan 2 (dua) *policy brief* yaitu :

- a. Danau Rawa pening Menjadi Bening ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah kepada Pokja terkait agar menyampaikan laporan realisasi kegiatan pengelolaan Danau Rawa

Pening tahun 2019 dan Rencana Kegiatan tahun 2020 sesuai dengan Pokja masing-masing kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah;



**Gambar 3.7 Nota Kesepahaman Pengelolaan Danau Rawa Pening dan DAS Tuntang.**

- b. Sampah Membawa Berkah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar menindaklanjuti rekomendasi dan maklumat Kongres Sampah.



**Gambar 3.8 Kongres Sampah Tahun 2019**

- 4). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menghasilkan 2 (dua) *policy brief* yaitu :
- a. Pengelolaan Dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Untuk Mendorong Target Rued (Energi Mix) di Jawa Tengah Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah untuk pemasangan *rooftop* pada gedung-gedung di instansi pemerintah;



**Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Energi Baru terbarukan (EBT) mendukung RUED (Energi Mix)**

- b. Pemantauan dan Pengawasan Distribusi Migas Bersubsidi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah untuk lebih cermat dalam pemberian surat rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan dan pertanian.



**Gambar 3.10 Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Migas di Jawa Tengah**

- 5). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan menghasilkan 1 (satu) *policy brief* yaitu :
  - a. Kebijakan dan strategi perencanaan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan tercipta sinergi serta keberlanjutan produktifitas pertanian.

6). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan menghasilkan 2 (dua) *policy brief* yaitu :

- a. Inisiasi pembuatan Sistem Informasi Nelayan Yang Terintegrasi (SINTEN) sebagai *database* nelayan Jawa Tengah, penerima BBM subsidi, media perijinan, pelelangan ikan serta bantuan sosial lainnya;



**Gambar 3.11 Rakor Persiapan Penerapan Sistem informasi Nelayan Terintegrasi di Jawa Tengah**

- b. Inovasi teknologi untuk peningkatan dan pengembangan komoditas pergaraman di Jawa Tengah dengan menggunakan *Geo Membrant*.



**Gambar 3.12 RAKOR Membangun Pasar Domestik Garam rakyat Jawa Tengah**

7). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Menghasilkan 3 (tiga) *policy brief* yaitu :

- a. Pendataan Aplikasi Agromap guna percepatan logistik daerah;

- b. Akurasi Data Pangan Melalui Pengembangan Kartu Tani;
- c. Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Pendataan dan Informasi yang Akurat.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp 1.543.800.999,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 1.600.000.000,-, terdapat efisiensi sebesar 0,93%.

## **SASARAN2**

### **MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

- a) **Indikator Sasaran** : Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	80	96	83.33

Realisasi Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mencapai target 100%. Indikator ini ditunjang oleh Program Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan strategis daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

1) *Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta*

- Kebutuhan lahan seluas 6.088.977 dengan jumlah bidang 5.856 sepanjang 54,54 km di Jawa Tengah Seksi I Kartasura-Prambanan melewati 13 Kecamatan di 3 Kabupaten
- Trase di Kabupaten Karanganyar dan Boyolali sudah disetujui dan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang
- Trase di Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian trase sesuai usulan Bupati Klaten terkait dengan desa terisolir, mata air dan rest area telah disepakati;
  - b. Usulan tambahan akses pada Simpang Susun Delanggu, di Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sesuai Surat Bupati Klaten Nomor 620/755.1/23 tanggal 30 Agustus 2019 akan difasilitasi seiring pertumbuhan Kawasan Industri dan mempertimbangkan tingkat kelayakan finansial jalan tol pada tahap operasional, untuk itu Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI akan menjawab surat usulan Bupati seperti tersebut di atas.
  - c. Usulan perubahan perbandingan kemiringan lereng timbunan dari 1 : 4 menjadi 1 : 2, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan luasan lahan pertanian produktif, pemukiman, kebutuhan pembebasan lahan, aspek teknis dan keselamatan jalan, untuk itu akan didukung dengan surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Dirjen Bina Marga agar segera mengajukan revisi terhadap Surat Pengajuan Penlok yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

## 2) *Fasilitasi di Bidang Perumahan*

- Sesuai Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), RTLH masih sebesar 1,6 juta (67%), backlog kepemilikan 752.848 (20%) dan kependhuanian 503.703 (13%) yang disebabkan minimnya fasilitas pembiayaan bagi MBR, harga semakin tinggi dan keterjangkauan bagi masyarakat;
- Dari data SUSENAS, masih terdapat 6 juta (67%) RT yang berpendapatan di bawah 2,5 juta/bulan yang tidak dapat menjangkau KPR FLPP;
- Urgensi dalam penyelenggaraan PKP adalah Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP) sesuai dengan amanah UU 1 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah yang memuat perencanaan penyelenggaraan PKP yang telah, sedang dan akan berjalan serta penyusunan Basis Data PKP;
- Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi aktif dengan Kementerian PUPR RI dan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BAPPEDA untuk :

- a. Mempedomani peraturan perundangan pada penyelenggaraan PKP sehingga menjadi target pemerintah daerah dalam RPJMD;
- b. Penyusunan RP3KP bagi Kabupaten/Kota yang belum menyusun;
- c. Penyesuaian data di bidang Perumahan diperlukan :
  - 1) Verifikasi data melalui PBDT yang tersedia dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) Provinsi maupun Kab/Kota mengingat sumber data bidang perumahan menggunakan statistik sektoral;
  - 2) Selanjutnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyepakati baseline data yang dapat digunakan untuk intervensi program pembiayaan perumahan bagi MBR serta agenda prioritas, strategi maupun pembagian peran
- d. Perlu program pembangunan penyediaan perumahan yang berkelanjutan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat (sebagai tolak ukur kemiskinan);
- e. Inovasi dalam skema pembiayaan penyediaan perumahan untuk MBR dengan melibatkan berbagai pihak akademisi maupun swasta;
- f. Mendorong pengembang melaksanakan kewajiban PSU dalam penyediaan rumah MBR melalui FLPP/Subsidi Pemerintah.

### 3) *Penanganan Danau Rawapening*

- Danau Rawapening sangat spesifik dan sangat strategis serta merupakan danau yang indah. Letaknya berada pada segitiga pertemuan Jogyakarta-Solo-Semarang. Oleh karena itu danau Rawapening menjadi landmark Jawa Tengah dan termasuk dalam Kawasan strategis provinsi. Danau Rawapening sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan berbagai tekanan, tetapi memiliki manfaat tinggi sebagai sumber air tawar, produksi pangan dan pengendali banjir.
- Berbagai tekanan baik di daerah tangkapan air maupun di badan danau telah merubah fungsi danau sebagai pengatur tata air menjadi terganggu. Banyak upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun pihak lain namun



sampai saat ini kondisi danau tidak mengalami perbaikan bahkan cenderung lebih degradative. Hal ini menunjukkan bahwa program yang telah diterapkan di danau Rawapening belum menunjukkan dampak nyata.

- Penanganan oleh multi stakeholders yang dibentuk melalui Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 610/44 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Danau Rawa Pening Provinsi Jawa Tengah
- Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening yang dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam penyelamatan Danau Rawa Pening;
- Penandatanganan Nota Kesepakatan antara 6 (enam pihak) yaitu Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Semarang tentang Penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan DAS Tuntang

#### 4) *Pengembangan Kartu Tani*

- Berdasarkan Roadmap penggunaan Kartu Tani. Ditargetkan tahun 2019 penggunaan kartu tani mencapai 50 %, namun sampai akhir september 2019 baru mencapai 20,2%;
- Belum adanya Payung hukum sebagai dasar penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di Jawa Tengah telah disusun Peraturan Gubernur tentang Penerapan Kartu Tani di Jawa Tengah, namun masih dalam proses di Biro Hukum.
- Proses Draft Peraturan Gubernur Jawa Tentang Pelaksanaan Kartu Tani di Jawa Tengah di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
- Proses Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Sistem Informasi Pertanian di Provinsi Jawa Tengah ke Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
- Workshop dan Sosialisasi Pengembangan Kartu Tani tanggal 22 - 23 Oktober 2019

#### 5) *Inisiasi Dan Fasilitasi Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)*

- Stabilisasi harga sulit dipertahankan karena sangat tergantung dari ketersediaan pasokan, dimana pada saat panen raya harga jatuh dan pada saat paceklik harga

akan tinggi, sehingga perlu pengaturan sistem logistik yang baik dengan memotong rantai pemasaran dengan melibatkan BUMD.

- Perlu Penyusunan pergub terkait penugasan BUMD pada sektor pangan
- Koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar Sislogda di Jawa Tengah segera terealisasi.

6) *Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi Di Jawa Tengah*

- Telah disusun data nelayan, baik ABK maupun pemilik kapal, dari 17 kab./Kota wilayah pesisir Jateng;
- Telah dilakukan pembangunan sistem informasi nelayan bekerjasama dengan Tim IT BRI;
- Sistem telah terbangun dan siap untuk dilaunching pada Harkanas bulan Nopember 2019. Untuk tahap awal, sistem digunakan untuk pembelian BBM subsidi oleh nelayan di SPDN dengan lokasi pilot project di Kabupaten Pati.
- Telah dilakukan sosialisasi di 3 (tiga) lokasi, yaitu : Kab. Pati, Kab. Batang dan Kota Semarang;
- Untuk Kota Semarang masih terkendala pada belum adanya SPDN;
- Penerapan Kartu Nelayan Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi belum ada payung hukumnya

7) *Pengelolaan Dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Untuk Mendorong Target Rued (Energi Mix)*

- Dilaksanakan rakor EBT kebijakan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan untuk mendukung RUED (Energy Mix tanggal 28 – 29 Maret 2019)
- diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 671.25/0004468 tanggal 1 Maret 2019 perihal implementasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS ATAP)
- dilaksanakannya MOU dengan Institute For Essential Services Reform (IESR) tentang pengembangan Jawa Tengah sebagai Provinsi Surya (Central Java Solar Province Initiative)
- Pembangunan Rooftop di beberapa bangunan instansi pemerintah di Jawa Tengah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp. 3.390.586.574,- atau 98,28 % dari total pagu sebesar Rp. 3.450.000.000,- . Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,72% dari pagu anggaran yang telah ditentukan

**b) Indikator Sasaran** : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	80	96	83.33

Realisasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi sebesar 80%. Indikator ini ditunjang oleh Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dibawah lingkup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Dari 9 Perangkat Daerah lingkup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam terdapat 40 (empat puluh) indikator kinerja utama (IKU), dimana dari total tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator telah tercapai sesuai

target tahun 2019, sisanya 8 (sembilan) IKU tidak tercapai. tidak tercapaian iku disebabkan karena menunggu data rilis dari BPS untuk triwulan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 IKU

No	Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Ketercapaian
1	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	528537	501597	94,90
2	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi)	11543015	8799422	76,23
3	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	200836	163668	81,49
4	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	102726	66701	64,93
5	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	3660360	3390970	92,64
6	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kelapa)	3660360	3390970	92,64
7	Dinas Pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	2934025	2877063,03	98,06
8	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Susu	101460171	100799241	99,35

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 75 - 100.

Pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000.000,- termasuk kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dan Kegiatan Pelayanan Penyediaan makan dan minum rapat perangkat daerah. Sampai dengan akhir Desember 2019 anggaran kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dan Kegiatan Pelayanan Penyediaan makan dan minum rapat perangkat daerah adalah Rp. 950.000.000 ,- terserap sebanyak Rp. 894.905.863,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,20 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang ada pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebesar 3,1 % atau senilai Rp. 213.831.322,-. Hal ini menunjukkan adanya tingkat penggunaan anggaran yang ketat dengan menggunakan asas manfaat.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya

1. Tidak terpenuhinya anggaran sesuai dalam rencana strategis;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

#### **B. Saran**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan:

1. Penyediaan anggaran sesuai dengan rencana strategi;

2. Penambahan dan pengoptimalan SDM yang ada;
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan SKPD terkait, dalam rangka peningkatan produksi sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yakni fungsi fasilitasi dan koordinasi;
4. Penambahan sarana dan prasarana penunjang.

Demikian laporan Instansi Kinerja pemerintah **Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Januari 2020

**KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

**DADANG SOMANTRI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506221987031007







